

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Pustaka Buku

A.Halim.2004. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Selemba Empat

Damardjati, R.S. 1995. *Istilah-istilah Dunia Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Hilman Hadikusuma.1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju

Kaho, Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada

Kartini Kartono.1976. *Pengantar Metodologi Research*.Bandung: PT. Alumni.

Kodhyat, H. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Liga,M Suryadana.2013. *Sosiologi Pariwisata*. Bandung : Humaniora

Mamesa, DJ, 1995. *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta

Nyoman.S. Pendit. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradya Paramita

Sabarno, Hari.,MBA.,M.M. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salah Wahab.1997. *Managemen kepariwisataan* Terjemahan Frans Gromang.
Jakarta : PT Pradnya Paramita

Sukardi.2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi*. Jakarta: Raja
Buku.

Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar - Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andhi

Wijaya,HAW.2002.*Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta :PT Raja
Grafindo Persada)

Yoeti,Oka A, dkk.2006. *Pariwisata Budaya :Masalah dan Solusinya*.Mataram
:PT.Balai Pustaka

2. Sumber Pustaka Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Pariwisata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata nasional 2010 – 2025

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013 – 2033.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat rekreasi dan Olah Raga.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kerinci

Keputusan Bupati Kerinci Nomor 970 / Kep./58/2010 tentang Penunjukan Perangkat daerah Pelaksana Penagih Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010.

3. Sumber Pustaka Internet

www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2959

<https://analisispengembanganpariwisata.blogspot.co.id/> di akses pada 1 Maret 2018

<http://www.infokerinci.com/p/geografi.html>

4. Sumber Pustaka Jurnal

Dores tarinate, dkk, Jurnal Administrasi Publik. 171. Implementasi Fungsi Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Suatu Studi Di Kecamatan Loloda Utara , (ejournal.unsrat.ac.id , 2014)

Widyastusi, A Reni. Jurnal EKOSAINS | Vol. II | No. 3 | Oktober 2010,

Haywood, K.M. Jurnal Internasional. Responsible and responsive tourism planning in the community. Tourism Management 9 (2) 1988.

Deddy Prasetya Maha Rani1. Jurnal Politik Muda. PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA Kabupaten

Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang) Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014

Eston Annisa, Pengelolaan Potensi Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Banyuwangi Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Semarang : Fakultas Hukum Undip, 2016.

5. Sumber Pustaka Bahan Hukum Lain

Progres Report Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Kerinci Periode November 2015-Okttober 2016

RPJMD Kab. Kerinci 2014-2019 Hal V-1 sampai V-2

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Tentang Pariwisata Tahun 2017

DISPARBUDPORA Kabupaten Kerinci, Rencana Strategis 2014– 2019 .

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Cascading, Iku Dinas Pariwisata kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kerinci Tahun 2017.